

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisrudence)*, Jakarta, Kencana.
- Addien Iftitah, 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya*, Lex Privatum, Vol.II.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi 1. Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Depok
- Ali Achmad Chomsah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1. Cetakan ke-9, Jakarta Djambatan.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, , Laksbang Pressindo.
- F.A.M Stroink dan Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- G.H.S Lumbun Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung, Nuansa & Nusamedia.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori Teori Hukum*, Malang, Setara Press
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- J. Andy Hartanto, 2012, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet. Ke-2, Yogyakarta Laksbang Mediatama.
- Maria S.W Sumadjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, Rajawali Prees
- Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.

Supomo, 2006, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Triana Rejekiingsih, 2016, *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*, Yustisia,

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta Teknik Pembuatan Akta*, Jakarta, Prenamedia Group.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, pewarisan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Kode Etik IPPAT menurut Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 112/Kep-4.1/IV/2017 Tanggal : 27 April 2017

## **Jurnal**

Chintya Agnisa Putri. 2018. Jurnal: *Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Akta Volume 5 Nomor 11.

I Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016. Jurnal: *Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal IUS. Vol.IV, No. 1

Nurudin. 2016. Judul: *Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh Ppat*, Jurnal Mahasiswa.

Sahnan, M. arba, L. Wira Pria Suhartana. 2018. Jurnal: *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jurnal IUS. Volume 7, Nomor 3.

Tata Wijayanta. 2014. Jurnal: *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Vol. 14 No. 2. Jurnal Dinamika Hukum.

## Artikel

Sri Winarsi. Artikel: *Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum*, Majalah Yuridika, 2002

## Internet

Sigar Aji Poerana, *Sanksi Bagi PPAT Yang Membuat Akta Tak Sesuai Data*, [//www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe7c8b0c2b9d/sanksi-bagippat-yang-membuat-akta-tak-sesuai-data/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe7c8b0c2b9d/sanksi-bagippat-yang-membuat-akta-tak-sesuai-data/), diakses pada tanggal 11 Mei 2023

Mohd. Afnizar, *Kedudukan Akta Aautentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPperdata*, <https://mkn.usu.ac.id/images/28.pdf>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023

Putri Ayu Trisnawati. S.H, 2020, *Jenis-jenis Peralihan Hak Atas Tanah*, <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023

Yandi M. Rofiyandi, 2022, *Definisi Lelang, Fungsi, Manfaat, dan Cara Kerjanya*, <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62c4e578c1a78/definisi-lelang-fungsi-manfaat-dan-cara-kerjanya>, , diakses pada tanggal 14 Mei 2023

[http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5993/2/502015238\\_BAB%20II\\_SAMPAI\\_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5993/2/502015238_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf), diakses pada tanggal 14 Mei 2023

Tim Editorial Rumah.com, 2022, *Badan Pertanahan Nasional (BPN): Pengertian, Tugas, dan Fungsinya*, <https://www.rumah.com/panduan-properti/badan-pertanahan-nasional-67503>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023

KBBI online, <https://knni.kemendikbud.go.id/entri/kepastian>, diakses pada tanggal 8-9 Mei 2023

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3520> Diunduh pada hari Sabtu, 08 Juli 2023, Pkl.21.45WITA.

<https://ifnconsulting.id/tinjauan-perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-pmh-dalam-hukum-perdata-pidana/> Diunduh Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2023. Pkl.21.01WITA

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> Diunduh Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2023. Pkl.21.05 WITA